



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### MARITAL RAPE DALAM TINJAUAN

#### HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Kebutuhan seksual merupakan salah kebutuhan manusia yang amat mendasar. Mengutip ‘teori kebutuhan’ yang dikemukakan Abraham Maslow (*Maslow’s hierarchy of needs*), jenjang kebutuhan manusia dapat digambarkan dalam beberapa tingkatan, yaitu kebutuhan dasar (*basic needs*), kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan (*self esteem*), dan kebutuhan beraktualisasi diri (*self-actualization*) sebagai kebutuhan yang paling atas. Dari kelima tingkatan tersebut, dan kebutuhan seksual termasuk dalam kategori pertama (*sex as one of the basic needs*).

Kendati sebagai kebutuhan, namun pemenuhannya tidak dilakukan sembarangan. Sebagai makhluk beradab, manusia menyalurkan kebutuhan seksual ini dalam sebuah lembaga suci yang disebut perkawinan, ketentuan ini berlaku jamak dalam tradisi dan kebudayaan di dunia.

Dari lembaga perkawinan ini kemudian lahir institusi keluarga dan rumah tangga. Keluarga terbentuk sebagai institusi terkecil di dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah diakui keberadaannya oleh negara dan dilegitimasi oleh badan hukum yang mengaturnya.

Pada dasarnya, setiap pasangan menginginkan terbangunnya keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.



Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat berjalan mulus, rasa kebahagiaan dan saling mencintai tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh suami istri. Sebagian keluarga mengalami masalah berupa ketidaknyamanan, tertekan, kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya. Bahkan tak jarang terjadi berbagai ragam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual yang salah satu bentuknya adalah berupa *marital rape*.

### • **Marital Rape Sebagai KDRT dalam Diskursus Gender**

Istilah KDRT menjadi salah satu akronim yang paling akrab di telinga masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Singkatan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menambah khazanah dan deretan wacana yang populer dalam diskursus kesetaraan gender di samping beberapa wacana yang telah ada sebelumnya seperti emansipasi wanita, feminisme, diskriminasi gender dan lain sebagainya. Umumnya, konten istilah KDRT mengonotasikan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku, meski tidak menutup kemungkinan yang terjadi adalah sebaliknya.

Akronim KDRT makin populer terutama pasca dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diikuti dengan penegakan hukumnya yang telah menyeret banyak pelakunya ke balik jeruji besi. Seiring waktu, popularitasnya makin melejit bersama tumbuhnya berbagai lembaga pemerintah maupun swadaya yang konsen melakukan sosialisasi dan serta advokasi hukum terhadap korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Belum lagi ditambah dengan maraknya pemberitaan di berbagai media cetak maupun elektronik membuat KDRT menjadi salah satu isu sentral yang menarik perhatian publik.



Kendati demikian, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang tindak KDRT bisa dikatakan belum merupakan suatu pemahaman yang utuh sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Pada umumnya, KDRT baru diasumsikan sebagai tindak kekerasan fisik, padahal cakupan KDRT yang dimaksud dalam hukum positif jauh lebih luas dari itu, yaitu mencakup segala tindak kekerasan psikis dan juga kekerasan seksual (*marital rape*).

### • Pusaran historis diskriminasi gender

Dirunut dari akar historisnya, KDRT merupakan kelanjutan dari diskursus mengenai diskriminasi gender yang santer sebagai salah satu isu global yang paling menarik perhatian masyarakat dunia sejak awal era modern, terutama di abad XX yang menaruh perhatian besar pada perjuangan hak-hak kaum wanita.

Menurut Collins –sebagaimana dikutip Megawangi-, tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang.

Dalam tatanan itu, menurut Simone de Beauvoir, perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang kedudukannya berada di bawah superioritas laki-laki.

Perempuan selalu dianggap bukan makhluk penting, melainkan sekedar pelengkap yang diciptakan dari dan untuk kepentingan laki-laki.

Akibatnya, ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan lebih banyak ditempatkan di ranah domestik, sedangkan laki-laki berada di ranah publik.

Wacana ini berlanjut hingga era *post-modern* dengan memperluas tinjauan diskriminasi gender dalam berbagai aspek dan kehidupan manusia, baik di segi sosial, budaya, politik, ekonomi, agama dan lain sebagainya.

Secara garis besar, tema besar diskriminasi gender mengerucut pada beberapa fokus,



seperti misalnya pada persoalan kontroversi kepemimpinan perempuan, persoalan kekerasan (violence) yang dialami oleh kaum perempuan di tengah kehidupan masyarakat dan lain sebagainya.

Khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan, isu ini bukan hanya menjadi pembicaraan di negara-negara berkembang atau di dunia ketiga, tapi juga menjadi problem di negara-negara maju yang kerap diasumsikan memiliki peradaban yang tinggi dan –konon- amat menjunjung tinggi hak-hak kesetaraan dan kemanusiaan.

Isu diskriminasi dan kekerasan ini pada gilirannya mengundang berbagai wacna dan reaksi di tengah masyarakat global. Salah satu reaksi yang paling menonjol adalah disahkannya sebuah konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) pada tahun 1972 yang digagas negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Jauh sebelumnya, pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut memuat hak-hak dan kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Hanya saja, karena deklarasi sifatnya tidak mengikat, maka demi menguatkan tujuan tersebut PBB lalu menuangkannya dalam sebuah konvensi. Indonesia sendiri turut menandatangani Konvensi CEDAW tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen.

Upaya di atas dilanjutkan dengan diserukannya rekomendasi umum PBB Nomor 19 Tahun 1992 yang juga mengandung butir-butir rekomendasi khusus untuk dilakukan





negara-negara yang turut meratifikasi CEDAW. Selanjutnya diadakan pula Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Wina tahun 1993 yang menciptakan suatu terobosan bagi perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan. Dalam program aksinya, Deklarasi Konferensi Wina 1993 menyebutkan bahwa kekerasan berbasis gender, apapun jenisnya, merupakan pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, dan oleh karenanya harus dihapuskan.

Di Indonesia sendiri, isu diskriminasi gender sendiri mulai menjadi wacana di awal abad ke-XX, di mana istilah ‘emansipasi’ mulai bergaung di tengah masyarakat. Dalam hal ini, sosok RA Kartini ditahbis sebagai tokoh pendobrak tatanan adat di masyarakat feodal –khususnya di Jawa- yang memperlakukan wanita sebagai kaum sub-ordinat di bawah kungkungan pria. Menurutnya –sebagaimana dikutip Tashadi- adat yang dipaksakan itu merupakan suatu tradisi yang mati, sebab para wanita Indonesia di abad XIX sama sekali tidak mengenal dan mempunyai hak apa pun sebagai manusia. Beberapa buku sastra yang terbit di era pra kemerdekaan juga mengangkat tema perjuangan wanita untuk memperoleh perlakuan setara, semisal roman ‘Azab dan Sengsara’ karya Merari Siregar (1920), ‘Siti Nurbaya’ karya Marah Rusli (1922), ‘Apa Dayaku Karena Aku Seorang Perempuan’ karya Nur St. Iskandar (1923), ‘Dayar Terkembang’ (1936) yang ditulis oleh St. Takdir Alisyahbana dan lain sebagainya.

Di masa pra-kemerdekaan itu, wacana diskriminasi di era tersebut banyak berfokus pada pusran emansipasi dan perjuangan perempuan mencari identitas, melawan kawin paksa dan lain sebagainya, dan uniknya kebanyakan penulisnya justru adalah kaum pria.

Pada tahun 1984, Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut meratifikasi Konvensi CEDAW (*Convention On The Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 (Tambahan Lembaran Negara Nomor



3277). Seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Konvensi tersebut sepenuhnya diterima oleh legislator Indonesia, kecuali Pasal 29 yang memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta Konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikat diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, di mana Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah Internasional. Catatan lain, dalam pelaksanaan undang-undang ini, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Pada tahun 1994, sepuluh tahun setelah Konvensi diratifikasi Indonesia, sejumlah wanita yang terdiri dari para pengajar dan aktivis sejumlah LSM perempuan membentuk kelompok kerja bernama *Convention Watch*. Mereka adalah para pengajar pada Program Studi Kajian Wanita, Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Pada saat itu Pusat Studi Wanita (PSW) dibentuk di tiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Pasca ratifikasi, wacana tentang kekerasan terhadap perempuan memasuki babak baru. Berbagai aturan dan lembaga penunjang pun berdiri dalam skala Nasional, baik karena swadaya masyarakat maupun atas inisiatif pemerintah. Salah satu lembaga swadaya yang berdiri misalnya adalah LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Jakarta yang didirikan tanggal 4 Agustus 1995. Sedangkan lembaga pemerintah misalnya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, sebagai lembaga negara independen yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan Kekerasan



terhadap Perempuan. Lembaga ini memperoleh dukungan dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) dan hibah dari lembaga donor.

### • Lahirnya Undang-undang PKDRT

Salah satu masalah yang dihadapi dalam penanganan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: bahwa pelanggaran terhadap hak perempuan, baik berupa diskriminasi atau juga kekerasan, belum dipahami sebagai pelanggaran atau kejahatan atas Hak Asasi Manusia, baik oleh anggota masyarakat, bahkan pada level penegak hukum. Selain itu, juga belum ada pengertian yang diterima secara luas bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan bersumber pada adanya kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang berakar pada nilai budaya, agama dan diperkuat oleh sikap serta perilaku pejabat, orangtua, tokoh agama, guru dan orang lain yang signifikan dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut tanpa disadari terlembaga dalam institusi keluarga maupun melalui pranata-pranata sosial yang dilegalkan oleh negara. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya semata-mata berupa kekerasan langsung, tetapi dibalik kekerasan langsung itu dicermati adanya akar kekerasan kultural dan kekerasan struktural yang menjadi sumber dari kekerasan itu.

Selaras dengan pernyataan di atas, maka bentuk kekerasan yang umum terjadi terhadap perempuan adalah kekerasan domestik (*domestic violence*), yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dan dikenal dalam lingkungan keluarga sendiri. Kekerasan jenis ini dapat terjadi pada berbagai tingkat sosial masyarakat, berbagai tingkat usia, pada masyarakat di seluruh level profesi dan strata, dan angka kejadiannya masih menunjukkan tingkat yang cenderung tinggi.



Sebagai bentuk kekerasan dalam wilayah domestik, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri (*wife abuse*), KDRT meliputi beberapa aspek, yakni: 1) kekerasan fisik, yang menyakiti secara fisik, b) kekerasan psikis, yaitu menyakiti secara psikis dan melukai perasaan istri, c) kekerasan ekonomi, yaitu menyiksa secara ekonomi dengan tidak memberi nafkah, d) kekerasan seksual, melakukan pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual, dan e) kekerasan sosial, membatasi pasangan dari aktivitas sosialnya.

Menyikapi eskalasi kekerasan dalam rumah tangga yang cenderung meningkat, pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah Indonesia melalui DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT). Lahirnya undang-undang ini merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia yang berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari tindak KDRT. Tujuan ini dapat dilihat dalam Ketentuan Umum UU PKDRT itu sendiri. Dalam penjelasan Undang-undang dimaksud disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu undang-undang ini juga mengatur tentang langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.

Hadirnya undang-undang ini bukannya tanpa rintangan. Sejak tahun 1998 LBH Advokasi untuk Perempuan Indonesia dan Keadilan (LBH APIK) bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang tergabung dalam Jaringan Kerja Advokasi Anti Kekerasan





Terhadap Perempuan (Jangka PKTP) menyiapkan RUU KDRT ini melalui dialog-dialog publik

hingga DPR menggunakan hak inisiatif yang kemudian mensahkan Undang-Undang ini. Ketika Undang-undang ini di bahas di lembaga legislatif, terjadi perdebatan yang cukup panjang dan alot, kelompok yang tidak setuju pada konsep RUU mengkhawatirkan Undang-undang ini nantinya akan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga dan akan menambah tingginya angka perceraian di tengah masyarakat.

Beberapa pihak menentang kehadiran undang-undang ini karena dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Pada rapat pembahasan RUU PKDRT hari Selasa tanggal 24 Agustus 2004, salah seorang anggota Pansus dari Fraksi TNI Polri mengatakan:

*“Untuk apa ikut budaya Barat? Kita sudah punya hukum sendiri yang melindungi perempuan. Ada hukum adat dan hukum Islam. Kalau saya pukul isteri saya lalu ia melapor ke orang lain, maka orang itu akan saya bunuh. Ini urusan intern dalam keluarga saya. Untuk apa orang lain ikut urusan rumah tangga saya?”*

Penolakan seperti di atas merupakan cerminan dari persepsi masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehadiran undang-undang ini dinilai sangat progresif mengingat beberapa ketentuan di dalamnya membawa misi *social engineering* yang bertujuan mengubah pola pikir masyarakat dalam mempersepsikan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaharuan hukum ini dinilai perlu karena Undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Sehubungan dengan itu, didorong karena adanya suatu kebutuhan karena maraknya tindak kekerasan oleh suami, terhadap anggota keluarganya, yang terjadi dalam rumah tangga. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberi nafkah dan kehidupan, namun tidak sepenuhnya dapat menangani kasus-kasus yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan



undang-undang khusus (*lex specialis*) yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.

Undang-undang PKDRT hadir dan memberikan jabaran yang luas tentang tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang dalam rumah tangga -terutama perempuan- yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selain itu diatur juga tentang lingkup rumah tangga yang dimaksud, yaitu meliputi (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Sebelum adanya UU PKDRT ini, seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena dahulu penanganan kekerasan dalam ruang tangga selalu terlambat. Artinya, korban atau keluarganya baru melaporkan kekerasan yang terjadi setelah mengalami luka parah atau bahkan telah meninggal. Perbuatan pidana tersebut biasanya dituntut berdasarkan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan atau Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Kasus tersebut hanya digolongkan pada perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara dalam UU PKDRT, penganiayaan dalam rumah tangga (*domestic violence*) diancam dengan pemberatan hukuman, hal inilah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang



Hukum Pidana. Selain itu, KUHP hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual. Sementara UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

Sejak kehadiran Undang-undang yang menjadi payung hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga ini, sedikit demi sedikit pandangan terhadap perempuan sudah mulai berubah, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai dilaporkan ke pihak yang berwenang. Sebagian masyarakat sudah mulai memberikan laporan-laporan tentang kekerasan yang dialami atau yang dilihat. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tercantum:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- Memberikan perlindungan kepada korban;
- Memberikan pertolongan darurat; dan
- Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Undang-undang ini juga mengatur bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani (Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Surat



penetapan perlindungan diberikan oleh Pengadilan atas permintaan kepolisian.

Dalam proses perlindungan untuk korban kekerasan kepolisian dapat bekerjasama dengan beberapa pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban”.

Undang-undang PKDRT ini diharapkan memiliki konstribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang, pihak berwajib dapat melindungi korban sekaligus menyediakan kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Kekerasan dalam rumah tangga yang tadinya hanya diposisikan sebagai kasus perdata -yang menjadi urusan privat masing-masing individu- tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.

Harapan begitu besar digantungkan banyak pihak pada undang-undang ini, namun kenyataan menunjukkan bahwa hadirnya norma hukum baru ini tidak serta-merta membuat angka kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan grafik penurunan. *Das sein* tidak berjalan seiring dengan *das sollen*, artinya terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang nampak ke permukaan justru eskalasi kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam ranah rumah tangga dari tahun ke tahun terus meningkat.

Berdasarkan penelitian Zaitunah Subhan, dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 271 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindak kekerasan.

Catatan mutakhir dapat pula dilihat dari laporan Lembaga Bantuan Hukum APIK yang





mencatat bahwa sepanjang tahun 2011 saja, LBH APIK wilayah Jakarta –tidak termasuk daerah

lain menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 706 pengaduan, dengan perincian: korban yang datang langsung sebanyak 311 kasus, pengaduan melalui telepon 181 kasus, pengaduan melalui email sebanyak 180 kasus, melalui surat ada 4 kasus, jemput bola 5 kasus, serta kasus yang ditangani paralegal sebanyak 25 kasus, dan kasus jaringan sebanyak 3 kasus.

Data lain misalnya dapat pula dilihat dari catatan tahunan Komnas Perempuan yang menunjukkan angka KDRT/Ranah Personal selama 10 tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Jumlah KDRT / Ranah Personal
2004	4.310
2005	16.615
2006	16.709
2007	19.253
2008	49.537
2009	136.849
2010	101.128
2011	113.878
2012	8.315
2013	11.719

Tabel 1:

Angka kekerasan dalam rumah tangga 2004-2013



Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya KDRT, yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, KDRT dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Secara eksternal, KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya.

Sifat domestik dan rahasia kekerasan ini membuat pencegahannya agak rumit, sehingga pelaku leluasa melakukan aksinya karena terlindung dari penglihatan manusia. Karenanya kekerasan ini disebut juga sebagai *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.

Faktor ekonomi juga sangat besar pengaruhnya terhadap adanya KDRT. Menurut data yang didapatkan berdasarkan kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, terhitung dari beberapa periode angka kasus kekerasan ini meningkat sebesar 45%.

Kondisi ekonomi yang semakin lama dirasakan semakin sulit oleh keluarga, terlebih dengan kejadian krisis ekonomi yang menimpa negara saat sejak beberapa dasawarsa membuat banyak rumah tangga yang goncang, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat bagi setiap orang untuk tetap *survive* menjalani hidup, termasuk bagaimana mengelola rumah tangga



agar sekalipun terlilit kesulitan ekonomi, tetapi bangunan rumah tangga tidak retak lantaran adanya kekerasan.

Memang, efektivitas suatu norma atau hukum positif tidak langsung dirasakan dampaknya dalam waktu singkat. Diperlukan waktu cukup lama bagi sebuah aturan hukum memainkan perannya sebagai *the tool of social engineering*. Eskalasi angka kekerasan dalam rumah tangga yang terus meningkat setidaknya menggambarkan keberanian sebagian korban untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang dialaminya yang selama ini mungkin didiamkan saja.

KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya.

### • **Genealogi *Marital Rape* Dalam UU PKDRT**

Seperti diterangkan di atas, persepsi publik terhadap tindak KDRT umumnya terbatas pada bentuk kekerasan fisik belaka. Padahal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga hadir dalam berbagai varian, dan salah satunya adalah kekerasan seksual. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :*

- a. *kekerasan fisik;*
- b. *kekerasan psikis;*
- c. *kekerasan seksual; atau*



d. *penelantaran rumah tangga.*

Secara detail, bentuk-bentuk KDRT yang disebutkan dalam pasal di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, kekerasan fisik, yaitu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya seperti: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

*Kedua*, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

*Ketiga*, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8): (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.





Keempat, penelantaran rumah tangga, yaitu seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (pasal 9).

Penelantaran rumah tangga dapat juga dikatakan sebagai kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti: penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

Dari ketentuan pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dengan tegas dinyatakan sebagai suatu tindak kekerasan yang diancam dengan hukuman pidana. Dalam bahasa hukum yang lebih populer, kekerasan seksual ini biasa juga disebut sebagai *marital rape*.

## • Deskripsi Umum Tentang *Marital Rape*

### • Definisi *Marital Rape*

Istilah *marital rape* merupakan kosakata yang berasal dari istilah asing (bahasa Inggris) yang terdiri dari dua suku kata, yaitu '*marital*' yang berarti 'segala hal yang terkait perkawinan' (*relating to or connected with the status of marriage*) dan '*rape*' yang berarti 'pemeriksaan'. Kata *rape* sendiri merujuk arti melakukan hubungan seksual [baik secara vaginal maupun anal] dengan seorang wanita atau pria tanpa persetujuan mereka. (*Sexual intercourse [vaginal or anal] with a woman or another man without their consent*).



Secara terminologi, *marital rape* setiap hubungan seksual atau penetrasi –baik vaginal, anal ataupun oral- yang tidak diinginkan, serta dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan, atau tanpa persetujuan istri (*any unwanted intercourse or penetration –vaginal, anal or oral- obtained by force, threat of force, or when the wife is unable to consent*).

Esensi paling mendasar dari tindakan ini adalah nihilnya persetujuan bersama (*not mutually agreed*) dari kedua belah pihak suami istri dalam berhubungan seks. Melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, hukum Indonesia tampak menganut ajaran ini dan mengesampingkan pandangan bahwa perempuan secara kodrati merupakan sub-ordinat (kalau tidak dikatakan objek) dalam hal hubungan seksual.

Secara sederhana, Milda Marlia mendefinisikan *marital rape* sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Tak jauh berbeda, Nurul Ilmi Idrus –yang berangkat dari pengalaman respondennya yang merupakan korban *marital rape*- mendefinisikan *marital rape* sebagai hubungan seksual yang disertai paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, dan penggunaan obat-obat terlarang atau minuman beralkohol.

Dengan demikian, istilah *marital rape* dapat dikatakan sebagai nomenklatur yang lebih familiar untuk menggantikan istilah ‘kekerasan seksual antara suami istri dalam rumah tangga’.

Istilah ‘kekerasan’ sendiri dalam konteks hukum umumnya diartikan sebagai serangan terhadap fisik dan mental, atau dapat juga dimaknai sebagai semua bentuk perilaku baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologi. Sementara kata ‘seksual’ berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.



*Oxford Dictionary of Law* mengistilahkan kekerasan seksual sebagai ‘*sexual offence*’,

yaitu kejahatan yang melibatkan semua tindakan kontak seksual (*any crime that involves sexual intercourse or any other sexual act*). Jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori ini biasanya berupa pemerkosaan, (*rape*), perkosaan anal (*buggery*), *incest*, pelecehan atau perbuatan tak senonoh (*indecent assault*), ungkapan tak senonoh (*indecent exposure*), cabul (*gross indecency*) dan penculikan (*abduction*).

*Marital rape* berbeda dengan penyimpangan seksual, yaitu segala orientasi seksual yang dimiliki seseorang yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan orientasi pada umumnya, seperti sodomi, homoseksual/lesbian, pedofilia, esibisionisme, hubungan seksual sedarah/inses, berhubungan dengan mayat (*nekrofilia*), dan berhubungan dengan hewan (*zoofilia*), meski terkadang penyimpangan seksual dapat merupakan salah satu bentuk varian atau menyertai *marital rape*.

Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organisasi* (WHO) mendefinisikan bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan seksual atau percobaan untuk melakukan tindakan seksual dengan kekerasan atau paksaan, ucapan seksual yang tidak diinginkan atau perbuatan yang mengarah ke situ, yang mana keseluruhan tindakan dan ucapan tersebut diarahkan kepada aspek seksualitas seseorang, terlepas dari hubungan pelaku dengan korban (baik ada hubungan maupun tidak). Kekerasan jenis ini dapat terjadi baik di masa damai maupun dalam situasi konflik bersenjata, dan dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling traumatis, mendalam, dan kerap terjadi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang dimaksud dengan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai,



atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan rumah tangga biasanya merujuk pada sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah. Pola hubungan rumah tangga umumnya terbentuk dari orang-orang yang terhubung oleh suatu ikatan yang tertutup (*closed relationship*), baik antara suami, istri dan anak-anak sebagai komposisi dari keluarga inti (*nuclear family*), atau berbentuk pada pola hubungan orangtua tunggal dan anak (*singlet parent family*), hingga yang berbentuk keluarga besar (*extended family*), atau juga keluarga kompleks (*complex family*).

Dengan demikian, bahwa *marital rape* atau kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual oleh suami atau istri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Definisi legalistik bagi *marital rape* dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 8 UU PKDRT yang membagi jenis kekerasan seksual dalam rumah tangga ke dalam dua pola, yaitu: *pertama*, perbuatan -dalam rumah tangga- yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, *Kedua*, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pola kekerasan *pertama* merupakan tindakan *marital rape*, sedangkan yang kedua termasuk ke dalam domain perdagangan manusia (*human trafficking*).

Dalam terminologi Arab, istilah *marital rape* disebut sebagai *al-ightishâb al-zauji* (الاعتصاب الزوجي). Dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'* dan juga *al-Mawrid* disebutkan bahwa kata *al-ightishâb* merupakan terjemahan dari kata '*rape*' dalam bahasa Inggris yang berarti 'memperkosa seorang wanita, atau berzina dengannya secara paksa' (اغتصاب المرأة: زنا بها كرها). Sementara kata '*al-zaujiy*' merupakan bentuk *nisbat* (*adjektiv*) dari kata *al-zauj* yang berarti





pasangan (suami atau istri), kata '*al-zaujiy*' umumnya diterjemahkan sebagai 'perkawinan' atau *marital*.

Tidak mudah menemukan nomenklatur *al-ightishâb al-zauji* ini –dan juga definisinya– dalam referensi-referensi Arab, bahkan dalam literatur-literatur kontemporer sekalipun, apatah lagi dalam khazanah kitab-kitab fikih klasik, sebab secara mendasar istilah impor ini berseberangan dengan sosiologi dan ideologi masyarakat Arab pada umumnya.

Namun seiring populernya wacana ini, kita dapat melihat beberapa pembahasan tentang *al-ightishâb al-zauji* ini dari penulis-penulis dan tokoh kontemporer, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sufyan 'Abdali, yang mendefinisikan *al-ightishâb al-zauji* sebagai berikut:

كُلُّ إِبْلَاجٍ جِنْسِيٍّ مَهْمَا كَانَتْ طَبِيعَتُهُ يُرْتَكَبُ عَلَى شَخْصِ الزَّوْجِ مِنْ طَرَفِ شَرِيكِهِ دُونَ رِضَاةٍ  
 “Setiap hubungan seksual –dalam bentuk apapun- yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan hidupnya, tanpa ridha) persetujuan) darinya .”

Sedangkan Dr. Muhammad al-Mahdi, guru besar kesehatan jiwa dari Universitas

al-Azhar mendefinisikan *al-ightishâb al-zauji* sebagai berikut:

إِكْرَاهُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ عَلَى مُمَارَسَةِ الْعِلَاقَةِ الْجِنْسِيَّةِ مِنْ دُونَ رَغْبَةٍ مِنْهَا فِي ذَلِكَ، وَبِشَكْلِ يَتِمُّ فِيهِ إِسْتِخْدَامُ الْعُنْفِ أَوْ التَّهْدِيدِ

“Pemaksaan dari suami terhadap istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa keinginan istri untuk melakukannya, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman.”

Dari dua definisi yang dikemukakan oleh Abdali dan al-Mahdi di atas, tampak bahwa pengertian tidak berbeda dengan pemahaman yang diuraikan oleh pakar-pakar lainnya.

#### • Indikator dan bentuk-bentuk tindakan *marital rape*

Merujuk pada pasal 8 Undang-undang PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan seksual



dalam rumah tangga terpola dalam dua bentuk, yaitu:

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ketentuan pasal di atas memberikan gambaran bahwa tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat terjadi dalam lingkup internal (antar orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut) maupun dalam lingkup eksternal (melibat orang di luar anggota keluarga), baik dengan tujuan komersial atau pun bukan. Namun, yang masuk ke dalam kategori *marital rape* adalah jenis yang pertama, yaitu pemaksaan seksual dalam lingkup internal. Adapun pemaksaan jenis kedua umumnya tidak lazim disebut sebagai *marital rape*, karena di dalamnya terkandung unsur pihak ketiga di luar perkawinan. Selain itu, pemaksaan jenis kedua ini dapat pula termasuk dalam kategori perdagangan manusia (*human trafficking*)

Indikator utama yang membedakan antara *marital rape* dengan KDRT jenis lain adalah terletak pada unsur ‘pemaksaan’ dan ‘hubungan seksual’ sebagai dua indikator kunci. Secara umum, pemaksaan -atau kadang disebut juga sebagai koersi- adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Secara praktis, pemaksaan bisa berwujud kata-kata kasar, menghardik, menyeret, intimidasi mental, menyakiti fisik, dan lain sebagainya. Dalam kasus *marital rape*, pemaksaan tersebut dilakukan dalam rangka realisasi kontak. Artinya, jika yang terjadi hanya pemaksaan dan kekerasan, misalnya kata-kata kasar atau bahkan pemukulan, namun bukan dalam rangka realisasi hubungan seksual, maka perbuatan tersebut hanya masuk kategori delik kekerasan fisik atau psikis.



Adanya unsur ‘pemaksaan’ sebagai indikator utama juga penting untuk membedakan antara *marital rape* dengan ‘perilaku seksual menyimpang’. Misalnya dalam kasus seks anal, jika perbuatan tersebut terjadi berdasarkan inisiatif bersama dan suka sama suka dari kedua belah pihak, maka hal tersebut tergolong sebagai penyimpangan seksual. Sebaliknya, jika terjadi karena paksaan dari suatu pihak, maka ia termasuk dalam kategori *marital rape*.

Umumnya, korban dari *marital rape* adalah para wanita yang berada dalam lingkup rumah tangga, yaitu istri, meski tidak menutup kemungkinan suami juga dapat berposisi sebagai korban. Inilah mengapa ketika disebutkan tentang *marital rape*, maka asumsi spontan yang muncul adalah tindak pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Hal ini juga berangkat dari anggapan umum bahwa pemerkosaan/kejahatan seksual biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, bukan sebaliknya.

Pengasumsian wanita sebagai korban juga dilatarbelakangi pada efek yang ditimbulkan dari kejahatan *marital rape* tersebut, di mana efeknya lebih dominan dirasakan oleh wanita daripada pria, baik secara fisik maupun psikis. Karena itu, Pemerintah juga mengeluarkan aturan lain yang secara spesifik mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga ataupun bukan, misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dalam Pasal 26 menyebutkan:

- (1) Setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan dan diskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah.
- (2) Kehidupan seksual yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kehidupan seksual yang:
  - terbebas dari infeksi menular seksual;
  - terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual;
  - terbebas dari kekerasan fisik dan mental;
  - mampu mengatur kehamilan; dan



- sesuai dengan etika dan moralitas.

UU PKDRT menegaskan bahwa masing-masing suami maupun istri dapat menjadi pelaku atau korban dari tindak kejahatan ini. Memang, di Indonesia kita belum pernah mendengar ada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya. Jangankan ‘istri memperkosa suami’, istilah ‘suami memperkosa istri’ saja sudah sangat jarang terdengar. Akan tetapi di beberapa negara di luar negeri, kasus semacam ini sudah ada yang masuk ke jalur hukum. Seperti yang terjadi di Korea Selatan beberapa waktu lalu, -sebagaimana dikutip Tempo- di mana seorang wanita bernama Shim didakwa di pengadilan dengan tuduhan memperkosa suaminya sendiri.

Bentuk *marital rape* yang dilakukan suami terhadap istri biasanya berupa pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, baik karena tidak siap, sedang haid, sakit, letih, kecapaian, atau juga bersetubuh di luar kebiasaan atau yang tidak disukai oleh istri dan perilaku seks menyimpang, seperti melakukan oral seks (seks lewat mulut), anal seks (seks lewat dubur), menyiksa pasangan secara fisik dan mental yang lebih dikenal dengan istilah *sadisme*, atau sebaliknya yang disebut dengan *masokhisme* dengan cara menyiksa diri secara mental dan fisik.

Sedangkan Farha Ciciek mengelompokkan *marital rape* ke dalam tiga bagian utama, yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.

Dalam temuan empiris LBH APIK, diuraikan bahwa *marital rape* secara teknis di lapangan terwujud dalam tindakan-tindakan yang lebih luas, misalnya berupa: (1) pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami, seperti memaksa Istri melakukan anal seks, oral seks dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri, (2) Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur, (3) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu





waktu yang sama sementara istri tidak menyanggupinya (4) Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak menginginkannya, (5) Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual, (6) Pemaksaan hubungan seksual saat istri sedang haid/menstruasi, (7) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki, (8) Melakukan kekerasan atau hal-hal yang menyakiti fisik istri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina istri, mengoleskan balsem ke vagina istri, menggunting rambut kemaluan istri dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

Sementara dari penelitian lembaga Rifka Annisa, dari klasifikasi beberapa kasus-kasus yang dilaporkan korban, dapat diperoleh bentuk-bentuk variasi *marital rape* sebagai berikut:

- Suami memaksa berhubungan dengan istri ketika istri tidak menginginkan (tidak siap) yaitu ketika istri sedang capek, sakit dan ketika sedang haid;
- Suami memaksa hubungan seksual dengan berbagai gaya yang tidak disukai istri atau istri merasa jijik untuk melakukannya. Misalnya istri dijilati kemaluannya oleh suami, sebaliknya suami menghendaki istri menjilati kemaluan suaminya, (oral seks dan anal seks)”;
- Suami memaksa istrinya menonton *film blue* (BF) dan memaksa istrinya untuk mengikuti dan mempraktekkan adegan yang ada dalam film tersebut.
- Suami memaksa hubungan seks dengan istrinya dengan menggunakan terong yaitu memasukkan terong ke dalam kemaluan istri.
- Suami tidak memberikan kebutuhan seks bagi istri atau istri tidak melayani seks suami atau



istri tidak melayani kebutuhan seks suami karena alasan WIL (Wanita Idaman Lain) alias selingkuhan.

Suami memaksa istri melacur atau menyuruh istri berhubungan dengan orang lain.

### • **Faktor penyebab terjadinya *marital rape***

Dalam pandangan feminisme Barat, kekerasan seksual pada umumnya merupakan salah satu bentuk dampak dari kesenjangan kekuasaan laki-laki dan perempuan dalam persoalan seksual. Menyitir MacKinnon, ketika membicarakan tentang kesetaraan dalam seks (*sex equality*), hal ini amat sulit dijelaskan, sebab kesetaraan adalah suatu persamaan (*equivalence*), sedangkan seks itu sendiri merupakan perbedaan (*distinction*). Grossi mengutip pernyataan MacKinnon yang menyebutkan bahwa seks merupakan bentuk dominasi nyata laki-laki terhadap perempuan (*male dominance and female subordination*).

Tak jauh berbeda dengan pandangan di atas, Patricia Mahoney –sebagaimana dikutip Milda Marlia dari Siti Aisyah- memaparkan bahwa penyebab *marital rape* secara garis besar sebagai berikut:

- *Reinforce power, dominance and control*. Pemaksaan hubungan seksual tidak selalu digerakkan motif hasrat seksual semata, namun sering kali dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan, dominasi dan kendali suami terhadap istri.
- *Ekpresi kemarahan*. Pemaksaan hubungan seksual dilakukan sebagai bentuk kemarahan ketika istri tidak memenuhi permintaan (perintah) suaminya.
- *Sterotype* atau pelabelan tentang bagaimana seorang istri atau perempuan bersikap. Misalnya: melayani suami dalam hubungan seksual adalah kewajiban istri, perempuan



dianggap menikmati hubungan seksual yang dipaksakan, perempuan berkata tidak padahal hatinya mengiyakan, dan sebagainya.

Dalam ranah diskursus gender, menurut Hannah, lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya *marital rape*. Situasi semacam ini pula yang membuat perempuan acap kali bungkam melaporkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Lebih-lebih peran serta publik, yang berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom di dalam keluarga sehingga membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Parahnya, -menurut Hannah- kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap pernikahan adalah legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum perempuan.

Dari rangkaian pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat terjadi, di antaranya :

- Kekerasan seksual dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan kejadiannya bersifat rahasia karena peristiwa kekerasan tersebut terjadi dalam ruang privat (rumah tangga).
- Kekerasan seksual dalam rumah tangga masih dianggap wajar karena adanya keyakinan sebagian orang bahwa hubungan seksual merupakan pelayanan yang menjadi hak suami dan suami berhak memperlakukan istri sekehendak suami sebagai pemimpin dan kepala dalam rumah tangga.
- Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan.



Kekerasan seksual dalam rumah tangga jarang diselesaikan melalui jalur hukum karena berbagai pertimbangan, seperti adanya kekhawatiran akan terbongkarnya aib keluarga, dan lain sebagainya.

Secara teknis, terkait faktor penyebab terjadinya tindak *marital rape*, Nurul Ilmi Idrus secara garis besar membedakannya menjadi dua faktor utama, yaitu penyebab langsung dan penyebab tak langsung. Adapun penyebab langsung bisa berupa terdiri:

• *Libido yang tidak berimbang.* Dorongan seksual dimiliki oleh setiap individu, akan tetapi dorongan ini berbeda-beda antara individu laki-laki dengan perempuan. Kulturenya laki-laki cenderung dapat mengekspresikan keinginannya dibanding perempuan. Berdasar hal tersebut seorang istri dalam keluarga cenderung pasif dalam merealisasikan libidonya. Kepasifan ini sebenarnya dapat dijembatani dengan *foreplaying*, akan tetapi metode ini tidak banyak diketahui oleh pelaku *marital rape*, akibatnya banyak hubungan seksual dilakukan tanpa kesepakatan alias terpaksa sehingga istri sering kali merasa sakit dan tersiksa. Apabila tidak dilakukan, maka istri dianggap melakukan penolakan atau bahkan tidak mampu melayani suami.

• *Penolakan istri.* Penolakan dapat dilakukan oleh istri karena cara suami memperlakukan istri dalam hubungan seksual, seperti hubungan seksual yang disertai dengan kekerasan, sehingga istri enggan melakukannya, istri sedang tidak bergairah pada saat akan berhubungan intim. Penolakan ini diartikan sebagai pembangkangan oleh pihak suami karena adanya keyakinan bahwa perempuan atau istri berkewajiban melayani suami sehingga suami berhak untuk memaksanya.

• *Suami mabuk setelah minum-minuman keras.* Kecenderungan orang yang mabuk akan





berprilaku tidak terkontrol.

Selain penyebab langsung, terdapat juga penyebab tak langsung, yaitu dapat berupa:

• *Kurangnya komunikasi.* Salah satu kunci kebahagiaan suami istri adalah apabila keduanya saling terbuka. Namun tradisi membicarakan seks dalam rumah tangga sekalipun yang dianggap tabu menjadikan suami enggan memperbincangkan secara terbuka, di samping adanya kultur yang menganggap perempuan hanya berkewajiban untuk melayani suami.

Hal ini menyebabkan istri merasa malu untuk mengambil inisiatif dalam hubungan seksual, meskipun istri sedang menginginkannya, sehingga menerimanya sebagai obyek seks semata.

• *Adanya teman selingkuh pihak suami.* Perselingkuhan suami dengan wanita lain secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri cenderung menolak hubungan seksual setelah mengetahui suaminya memiliki pasangan selingkuh karena terbayang suaminya melakukannya dengan wanita lain. Atau suami cenderung meminta cara hubungan seksual yang bervariasi yang tidak biasa dilakukannya dengan istri.

• *Ketergantungan dan kesulitan ekonomi.* Istri secara ekonomi tidak mandiri tapi tergantung pada suami. Hal ini menyebabkan istri tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) dalam hubungan seksual, meskipun sedang tidak menghendaknya. Istri akan semakin terpojok posisinya apabila menolak diajak berhubungan intim, ketika suami mengancam tidak akan memberikan kebutuhan ekonomi, sehingga istri akan merasa tidak berhak atau bahkan takut untuk menolak ajakan suami. Mengenai ketergantungan ini tidak hanya istri pada suami, dapat juga terjadi pada suami yang tidak bekerja sehingga bergantung secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ekonomis pada istri. Suami yang secara budaya dipersepsikan sebagai pemilik otoritas yang lebih tinggi dari istri, merasa kurang berharga di mata istri karena tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Kekurangan yang ada pada suami sering kali ditutupi dengan perwujudan dalam bentuk kekerasan baik secara fisik maupun psikis termasuk di dalamnya kekerasan seksual.

**Kawin paksa.** Kawin paksa sering kali mengakibatkan proses komunikasi antara suami istri menjadi sulit, sehingga persoalan-persoalan dalam rumah tangga jarang dibicarakan secara terbuka, termasuk dalam persoalan seksualitas.

Selain itu, dilema penegakan hukum di bidang ini juga menjadi salah faktor penyebab. Istri sebagai korban pada umumnya merasa takut melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada polisi karena khawatir sia-sia, memikirkan nasib ekonomi keluarganya, atau khawatir jika si suami masuk penjara akan berdampak buruk pada nama baik keluarga.

Dalam perspektif berseberangan, pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dianggap wajar ketika ada penolakan dari pihak istri tanpa alasan, sebab istri dinilai berada dalam pengaturan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kodrat perempuan dalam hubungan seksual cenderung pasif. Persepsi ini jamak dianut oleh masyarakat Timur pada umumnya, termasuk dalam Islam. Karenanya, tak mengherankan jika aturan hukum positif tentang *marital rape* di masyarakat Timur dirasa berseberangan dengan persepsi umum yang dianut masyarakatnya.

### • Dampak negatif *marital rape*

Menurut Angela Brown, dampak *marital rape* terhadap korban tidak lebih ringan dari umumnya korban perkosaan: semakin dekat hubungan si pelaku dengan si korban, semakin berat dan berisiko pula kekerasan yang dilakukannya, serta cenderung untuk dilakukan berulang-ulang



karena nihilnya halangan dari pihak lain.

Perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban kekerasan seksual suaminya akan terjangkiti beberapa karakter, antara lain: *pertama*, inferior (merasa rendah diri) dan kehilangan kepercayaan diri, *kedua*, kerap dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami ‘kalap’, dan *ketiga*, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan atau stres, seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacaunya siklus haid.

Dalam penelitian lebih lanjut, dampak *marital rape* tidak hanya terjadi dalam jangka temporer (*short term effect*) melainkan berkelanjutan (*long term effect*). Dalam hal ini, Marlina membagi menjadi dua kelompok, yaitu dampak medis dan psikis.

- Dampak Medis

*Marital rape* bisa menimbulkan lecet pada vagina istri atau luka fisik lain yang menyakiti. Ini terjadi bila saban hari suami menyetubuhi istri atau hubungan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan suami sedang dalam pengaruh minuman keras atau obat, atau suami melakukan kekerasan fisik saat sanggama. Dalam beberapa kasus, istri bahkan bisa saja mengalami memar wajah, luka kepala, pecah bibir, patah gigi depan, dan perihnya pendarahan vagina. Ini biasanya diakibatkan kasarnya perlakuan suami dalam sebuah hubungan seks yang dipaksakan saat istri sedang lelah atau ketiduran. Akibat lain hubungan seks yang dipaksakan saat istri lelah dan capai adalah sulitnya proses persalinan, bayi lahir prematur, dan bahkan keguguran.

Pada pemaksaan selera oleh pihak suami dalam hubungan seksual, akibat yang ditimbulkan adalah bisa berupa luka pada dubur (dalam kasus anal seks), muntah-muntah, penyakit kelamin menular, bahkan AIDS. Sementara, istri yang cidera fisik akibat *marital rape*



biasanya tidak mau berobat ke dokter atau tabib karena malu. Kalaupun ke dokter, ia enggan menjelaskan sebab sebenarnya dari penyakitnya karena tidak ingin kehidupan pribadi dalam keluarganya diketahui orang lain.

#### • Dampak Psikis

Secara psikis, *marital rape* bisa menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau ketakutan dan trauma berhubungan seks. Akibat lain, istri tidak lagi percaya diri karena merasa tak mampu melayani suami dengan baik, bahkan merasa dirinya adalah penyebab dari *marital rape* itu sendiri.

Pada tingkat yang lebih parah, istri akan mengalami ketakutan luar biasa (semacam paranoia), sampai-sampai ia merasa terus diancam oleh lingkungannya.

Selanjutnya, *marital rape* juga bisa membuat istri mengalami dampak psikis jangka pendek (*short term effect*) dan jangka panjang (*long term effect*). Dampak psikis jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini pada banyak kasus ditandai dengan gejala sulit tidur (*insomnia*) dan berkurangnya selera makan (*lost appetite*).

Adapun dampak psikis jangka panjang yang dialami korban *marital rape* adalah timbulnya sikap atau persepsi negatif tentang laki-laki (suami) dan seks karena trauma yang ia tanggung. Trauma adalah 'luka jiwa' yang diderita seseorang usai mengalami hal-hal yang dirasanya di luar batas wajar atau abnormal. Apabila seorang istri menjadi korban kekerasan, dan lantas mengalami gejala-gejala yang khas seperti mimpi buruk (*nightmare*) atau ingatan-ingatan





mendadak akan kejadian-kejadian sebelumnya (*flashback*) yang berlanjut terus hingga lebih dari 30 hari, ia sangat mungkin menderita *post-traumatic stres disorder* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai stres pascatrauma.

Tragisnya, semua penderitaan itu biasanya ditanggung dan dipendam saja oleh seorang istri tanpa bisa menemukan solusi untuk mengakhiri dilema yang ia rasakan, bahkan untuk sekedar bercerita pun teramat sulit, seperti dikatakan Lindsey, umumnya seorang wanita tidak memiliki kata-kata yang tepat representatif untuk mendeskripsikan kekerasan yang mereka alami.

### • **Marital rape sebagai tindak pidana**

Sebelum lahirnya UUPKDRT, kejahatan pemerkosaan (*rape*) hanya diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita yang bukan istrinya. Dari ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang menjelaskan tentang pemerkosaan, dijelaskan bahwa suatu pemerkosaan hanya dapat terjadi dalam kondisi sebagai berikut:

- Perempuan yang bukan istrinya (Pasal 285 KHUP). Ketentuan pasal ini mensyaratkan bahwa yang menjadi korban pemerkosaan bukanlah istri pelaku.
  - Perempuan yang bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP)
  - Perempuan yang belum 15 tahun atau belum masanya untuk kawin (Pasal 287 KUHP).
- Dalam hal ini, meski seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun menyetujui terjadinya hubungan seksual, namun perbuatan seksual seorang laki-laki dengannya tetap dianggap sebagai pemerkosaan.



Sedangkan hubungan seksual dengan perempuan yang merupakan istrinya, tapi belum masanya untuk kawin karena belum berusia 15 tahun (Pasal 287 KUHP), maka KUHP tidak menganggap hubungan tersebut sebagai tindak pidana pemerkosaan, kecuali bila perbuatan tersebut menimbulkan luka-luka, luka berat, atau kematian.

Ketentuan dalam pasal-pasal di atas jelas tidak mengklasifikasikan perbuatan perkosaan dalam ikatan perkawinan atau *marital rape* sebagai kejahatan yang dapat dihukum, sehingga istri tidak dapat mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan. Seandainya pun bisa, perkaranya akan dianggap dan diproses sebagai penganiayaan yaitu berdasar pasal 351, 353 KUHP<sup>17</sup>, dan bukan pemerkosaan.

Sebenarnya, dalam RUU KUHP tahun 2000, ketentuan dan paradigma hukum tentang pemerkosaan sudah hendak diubah, yang mana ketentuan pemerkosaan yang ada dalam rancangan UU ini meliputi segala bentuk perkosaan yang dicakup selain perkosaan yang selama ini dianut oleh KUHP, yaitu:

- Persetubuhan dengan paksaan terhadap istri (*marital rape*).
- Persetubuhan dengan anak di bawah umur (*statutory rape*)
- Persetubuhan dengan tipu daya (*deceitful rape*)

Namun hingga sekarang (tahun 2016), RUU KUHP belum jua kunjung dibahas tuntas dan disahkan oleh lembaga legislatif sebagai undang-undang.

Kehadiran UUPKDRT membawa suatu norma baru dalam masyarakat. Kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) -yang dinilai selama ini merupakan ranah privat- berdasarkan undang-undang ini telah dinyatakan sebagai suatu tindak kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UUPKDRT mengatur 3 (tiga) ketentuan pidana yang berkaitan dengan kejahatan

kekerasan seksual dalam rumah tangga, yaitu:

- Kekerasan seksual (*marital rape*) yang melibatkan anggota internal keluarga (suami istri), hal ini diatur Pasal 46 UU PKDRT yang menyebutkan sebagai berikut:

*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ( a ) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).*

- Kekerasan seksual yang melibatkan anggota eksternal di luar keluarga, baik dengan tujuan komersial ataupun bukan, dalam hal ini ancaman pidana yang diberikan lebih berat sebagaimana diatur Pasal 47 UU PKDRT yang menyebutkan sebagai berikut:

*Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ( b ) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*

- Kekerasan seksual (*marital rape*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dalam hal ini ancaman pidananya lebih berat dari 2 (jenis) kejahatan sebelumnya sebagaimana diatur Pasal 48 UU PKDRT yang menyebutkan sebagai berikut:

*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Tidak hanya di segi hukum materil, UU PKDRT juga mengatur tentang ketentuan formil (hukum acara pidana) yang berlaku khusus dalam pemeriksaan dan pembuktian perkara kekerasan seksual, khususnya terkait dengan pembuktian di persidangan. UU PKDRT memberikan keringanan dalam hal pembuktian, yang mana ditentukan bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Selengkapnya tentang hal ini diatur dalam pasal 54 dan 55 UU PKDRT sebagai berikut;

#### *Pasal 54*

*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.*

#### *Pasal 55*

*Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.*

Ketentuan di atas cukup logis mengingat bahwa dalam perkara yang bersifat kesusilaan agak sulit untuk mendapatkan saksi lain yang melihat secara langsung suatu kejadian dan peristiwa, maka dengan terdakwa tidak pernah membantah keterangan saksi korban di persidangan maka cukup telah memenuhi sebagai syarat minimum pembuktian sebagaimana secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU PKDRT di atas.

#### • **Ketentuan *Marital Rape* di beberapa negara**





Sebagai perbandingan, penting kiranya disinggung bahwa tren hukum pemidanaan *marital rape* ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi sudah mengglobal dan menjadi agenda hukum di berbagai negara. Akan tetapi, proses progresivitasnya selalu terbentur oleh ideologi kultural yang melandasi perumusan hukum tersebut.

Baik di dunia Barat maupun Timur, pengategorian *marital rape* sebagai tindakan kejahatan dapat dikatakan sebagai wacana baru. Di dunia hukum Barat sendiri, tindakan ini dulunya dipandang wajar sebagai konsekuensi hubungan suami istri. Matthew Hale (1609-1676), seorang mantan Hakim Agung Inggris kenamaan menyatakan –sebagaimana dikutip Finkelhor– bahwa seorang suami tidak dapat dituntut dengan delik pemerkosaan terhadap istrinya sendiri sebagai konsekuensi hubungan matrimonial di antara keduanya. Doktrin ini tetap dianut di dunia hukum Barat hingga abad abad XX. Finkelhor mengutip pernyataan Hale:

*“The husband cannot be guilty of rape committed by himself upon his lawful wife, for by their mutual matrimonial consent and contract, the wife hath given up herself in this kind unto her husband, which she cannot retract”.*

Barulah sejak tahun era 1970-an, kaum pendukung feminisme di Amerika Serikat mendesak pemerintah agar mencabut pengecualian *marital rape* dari delik pemerkosaan pada umumnya. Bertahun-tahun lamanya kalangan ahli hukum di Amerika Serikat berdebat dengan kelompok-kelompok anti kekerasan terhadap perempuan, hingga akhirnya pemerintah di 50 negara bagian mengesahkan *marital rape* sebagai delik aduan yang dapat diajukan ke pengadilan pada tahun 1993.

Dalam hal ini, kasus Lorena Bobbitts dengan suaminya John Bobbitts merupakan salah kasus *marital rape* paling terkenal di Amerika, yang mana Lorena yang merasa telah ‘diperkosa’ oleh suaminya, John –seorang mantan marinir-. Di pengadilan, terungkap bahwa John memperlakukan istrinya secara kasar dalam berhubungan seks, tidak memberi kepuasan pada



hasrat biologis istri, serta berselingkuh dan memamerkan perselingkuhannya. Perlakuan suami yang sedemikian membuat Lorena bereaksi brutal, hingga suatu hari (23 Juni 1993) setelah John memaksanya berhubungan seks, Lorena memotong kemaluan suaminya itu dan membuangnya. Oleh pengadilan, Lorena dinyatakan tidak bersalah karena dianggap tengah mengalami *post-traumatic stress* serta dorongan tak tertahankan (*irresistible impulse*) akibat tindakan *marital rape* yang dilakukan John. Adapun John, penisnya dapat disambung kembali setelah melalui operasi medis.

Sementara di Inggris, negara ini sudah lebih dahulu memperluas arti perkosaan terhadap segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa izin wanita itu dan bertentangan dengan kemauannya, termasuk paksaan dari suami terhadap istri. Perbuatan tersebut dapat di hukum maksimal seumur hidup.

Sedangkan di Perancis, persoalan *marital rape* mulai mendapat perhatian sejak pemerintah mengamandemen pasal 212 dan 213 Civil Code (KUHPertada) pada bulan Juni 1970 yang mengatur tentang kedudukan suami istri dalam rumah tangga. Dalam aturan lama, KUHPertada Prancis menyebutkan bahwa suami merupakan kepala keluarga, sedangkan istri adalah pengatur rumah tangga (urusan domestik), ketentuan ini mengisyaratkan bahwa istri harus setia dan mentaati suami sebagai kepala keluarga rumah tangga sehingga terkesan posisi istri sebagai pihak subordinat. Setelah diamandemen, Undang-undang Prancis menetapkan bahwa masing-masing suami dan istri memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama dalam mengatur keluarga baik secara materil maupun moril.

Di segi pidana, Mahkamah Agung Perancis baru mengakui dengan tegas adanya tindakan *marital rape* sebagai suatu tindak pidana tahun 1992. Sebelumnya di tahun 1990, Mahkamah Agung Prancis masih diliputi keragu-raguan akan adanya kejahatan jenis ini



mengingat sulitnya membuktikan unsur ketidakrelaan korban dalam perbuatan ini.

Dan hingga saat ini, PBB mengintrodusir bahwa pemerkosaan atau pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dianggap sebagai suatu tindak kejahatan di lebih dari 104 negara di dunia.

Dan dalam konteks legal historis di Indonesia, upaya menggulirkan *marital rape* terlebih dahulu meretas jarak psikologis yang diantarkan oleh istilah dari bahasa dari Barat. Belum lagi meluruskan tuduhan bias feminis yang selalu diartikan perlawanan terhadap laki-laki daripada upaya memanusiakan kaum perempuan secara universal. Hal lain, perangkat hukum yang ada belum memadai dan kurangnya perhatian pihak yang berwewenang, ini disebabkan persoalan budaya yang masih menganggap tabu menceritakan aib rumah tangga. Dan istri lebih memilih diam dengan alasan menjaga keutuhan keluarga.

Meski secara legal formal, *marital rape* telah dinyatakan undang-undang sebagai pidana kejahatan yang pelakunya diancam dengan hukuman yang cukup berat, namun tetap saja masih banyak anggota masyarakat yang menganggapnya sebagai tindakan wajar dan lumrah dalam suatu relasi antara suami istri. Diferensiasi pemahaman ini menimbulkan kendala dalam penegakan hukum sehingga tujuan ditetapkan suatu aturan hukum kerap tidak tercapai.

Sementara di negara-negara Timur Tengah, *marital rape* umumnya masih menjadi wacana yang dipopulerkan oleh aktivis feminis dan menyulut kontroversi di tengah masyarakat. Hingga saat ini, baru Libanon saja satu-satunya negara di Timur Tengah yang mengatur *marital rape* sebagai suatu kejahatan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 293 tentang perlindungan wanita dan anggota keluarga dari kekerasan rumah tangga (*qânûn himâyah al-nisâ' wa sâ'ir af'râd al-usrah min al-'unf al-usari*) yang disahkan DPR Libanon tanggal 7 Mei 2014.



Dalam Pasal 7 huruf (a) undang-undang Libanon ini diatur tentang perbuatan *marital*

*rape* yang disertai kekerasan fisik seperti pemukulan dan perbuatan menyakitkan lainnya, disebutkan:

مَنْ أَقْدَمَ بِقَصْدٍ إِسْتِيفَائِهِ الْحُقُوقَ الزَّوْجِيَّةَ فِي الْجَمَاعِ أَوْ بِسَبَبِهِ عَلَى ضَرْبِ زَوْجِهِ أَوْ إِذْيَائِهِ عُقُوبَاتٍ بِإِخْدَى الْعُقُوبَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ 554 إِلَى 559 مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَفِي حَالِ مُعَاوَدَةِ الضَّرْبِ وَالْإِذْيَاءِ، تُشَدَّدُ الْعُقُوبَةُ وَفَقًا لِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 257 مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

“Barangsiapa yang melakukan suatu pemukulan atau perbuatan menyakitkan terhadap istrinya -dalam rangka memenuhi hak-hak perkawinannya berupa hubungan seksual atau kausanya- diancam dengan salah satu hukuman yang disebutkan dalam Pasal 554 sampai Pasal 559 Hukum Pidana, dan apabila ancaman itu dilakukan secara berulang-ulang, maka hukumannya diperberat sesuai ketentuan Pasal 257 Hukum Pidana.”

Dan dalam Pasal 7 huruf (b) undang-undang ini diatur tentang *marital rape* yang disertai ancaman, disebutkan:

مَنْ أَقْدَمَ بِقَصْدٍ إِسْتِيفَائِهِ الْحُقُوقَ الزَّوْجِيَّةَ فِي الْجَمَاعِ أَوْ بِسَبَبِهِ عَلَى تَهْدِيدِ زَوْجِهِ عُقُوبَاتٍ بِإِخْدَى الْعُقُوبَاتِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ 573 إِلَى 578 مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَفِي حَالِ مُعَاوَدَةِ التَّهْدِيدِ تُشَدَّدُ الْعُقُوبَةُ وَفَقًا لِأَحْكَامِ الْمَادَّةِ 257 مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

“Barangsiapa yang melakukan suatu ancaman terhadap istrinya -dalam rangka memenuhi hak-hak perkawinannya berupa hubungan seksual atau kausanya- diancam dengan salah satu hukuman yang disebutkan dalam Pasal 573 sampai Pasal 578 Hukum Pidana, dan apabila ancaman itu dilakukan secara berulang-ulang, maka hukumannya diperberat sesuai ketentuan Pasal 257 Hukum Pidana.”

## • Beberapa kasus *marital rape* di Pengadilan Indonesia

### • Kasus Pidana

Sejauh ini, ketentuan pidana tentang pasal-pasal kekerasan seksual dalam UU PKDRT telah diterapkan sedemikian rupa dan tidak lagi sekedar menjadi ‘macan kertas’ atau pepesan kosong yang tidak dapat diterapkan secara riil di lapangan. Sejak diberlakukannya UU PKDRT, penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kasus-kasus *marital rape* sudah masuk lembaga peradilan.





Tercatat sudah ada beberapa kasus yang diadili dan diputus oleh pengadilan dalam perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga (*marital rape*) dan menjebloskan pelakunya ke balik jeruji besi. Meski persentasenya amat kecil jika dibandingkan dengan jenis tindak pidana lainnya, tapi paling tidak putusan-putusan peradilan pidana yang menyangkut bidang ini turut andil menyosialisasikan suatu norma baru di tengah masyarakat, terlebih perkara-perkara tersebut menjadi sorotan dan konsumsi pers karena dirasakan masih janggal oleh masyarakat serta mengundang perhatian publik. Di antara putusan-putusan tersebut di adalah:

- Putusan Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl

Kasus posisi dari perkara ini adalah: Terdakwa (Hari Ade Purwanto, 29 tahu) dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil dengan dakwaan pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban (Sri Wahyuni, *in casu* istri Terdakwa sendiri), di mana Terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan dirinya. Selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana ‘Melakukan perbuatan kekerasan seksual’ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 UU PKDRT menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa (suami) terbukti bersalah dengan melakukan ‘telah memaksa istrinya melakukan persetubuhan (*marital rape*), yang mana akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri korban, dan korban merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa.

Setelah mempertimbangkan perkara tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hj. Istining Kadariswati, SH., M.Hum dalam vonisnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘melakukan kekerasan seksual pada istrinya’ serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan juga di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Vonis pengadilan terhadap perkara ini cukup menyita perhatian publik karena dinilai berseberangan dengan suatu kelaziman yang dimengerti khalayak umum, hal ini ditandai dengan banyaknya komentar-komentar miring terhadap pemberitaan ini di media virtual.

- Putusan Nomor: 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps

Kasus Posisi: Terdakwa (M. Tohari alias Toto, 57 tahun) dituntut di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap korban (Siti Fatimah, *in casu* istri Terdakwa sendiri), di mana Terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan dirinya, korban waktu itu menolak melakukan hubungan seksual karena merasa sakit. Dalam kronologi peristiwa disebutkan bahwa usaha persetubuhan tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mencium / mengisap payudara dan memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan korban sehingga korban memasa kemaluannya sakit / nyeri.

Atas perbuatan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Hakim menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa



dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Setelah mempertimbangkan perkara tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Achmad Peten Sili, SH., M.H dalam vonisnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga’ serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

● Putusan Nomor: 287/Pid.Sus/2014/PN.Yyk

Kasus posisi dari perkara ini adalah: Terdakwa (Adhi Prasetyo, 31 tahun) dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dakwaan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban (Nila Juniasih, *in casu* istri Terdakwa sendiri), termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual, di mana Terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual dengan dirinya dengan cara dan disertai kekerasan, namun oleh karena korban sedang haid, Terdakwa lalu menyetubuhi korban pada dubur (sodomi). Meski dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjelaskan bahwa terdakwa melakukan kekerasan seksual, hanya saja Penuntut Umum tidak menuntut Terdakwa dengan Pasal 46, 47, atau 48 tentang kekerasan seksual, tapi hanya menuntut berdasarkan Pasal 44 tentang kekerasan fisik.

Selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Setelah mempertimbangkan perkara tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Bahtra



Yenni Warita, SH., M.Hum dalam vonisnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga’ sesuai dengan dakwaan penuntut Umum dan menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 bulan;

Ketiga kasus yang telah divonis Pengadilan di atas cukup menggambarkan berbagai latar belakang terjadi *marital rape*, yaitu pemaksaan hubungan seksual oleh suami kepada istri karena istri menolak, karena istri dalam keadaan menstruasi, atau karena istri dalam keadaan sakit.

#### • Kasus perdata perceraian dengan alasan *marital rape* di Pengadilan Agama

Seperti telah dijelaskan, istri sebagai korban *marital rape* cenderung lebih memilih perceraian sebagai solusi ketimbang melaporkan perbuatan suami sebagai tindak pidana. Hal ini dapat dimaklumi, sebab penyelesaian hukum melalui jalur pidana dirasa rumit dan menimbulkan banyak dampak negatif bagi keluarga. Misalnya pelaku dipenjara, maka yang menanggung malu dan beban adalah keluarga juga, terutama anak-anak yang juga membutuhkan kehadiran seorang ayah.

Oleh karena itu, jumlah penyelesaian *marital rape* melalui jalur perdata (gugatan cerai) lebih sering dijumpai di pengadilan ketimbang jalur pidana. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus gugat cerai di pengadilan agama yang diajukan istri. Namun oleh karena aturan hukum yang ada belum mengakomodir *marital rape* sebagai salah satu alasan perceraian, maka Majelis Hakim umumnya mengalihkan pertimbangan kepada unsur perselisihan terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang umumnya juga disertakan dalam gugatan.





Berikut beberapa di antara putusan gugat cerai tersebut:

• Putusan PA Jambi Nomor: 307/Pdt.G/2011/PA.Jb

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa selama berumah tangga dirinya sering dipaksa melakukan hubungan seksual, bahkan di saat Penggugat sudah manupouse dan sakit. Penggugat yang mengaku dipaksa menonton film porno menyatakan sudah tidak mampu melayani keinginan seksual suaminya, walau dibantu dengan obat-obat penguat nafsu seks. Puncaknya, pada bulan Desember 2010, sang suami (Tergugat) kembali memaksa melakukan hubungan seksual di bawah ancaman, sehingga keesokan harinya penggugat dan tergugat berpisah ranjang dan akhirnya berpisah tempat tinggal.

Dalam jawabannya, tergugat (suami) mengaku hanya menawarkan agar Penggugat menonton film porno dengan tujuan menambah gairah seks yang sama dengan dirinya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

• Putusan PA. Pekanbaru Nomor: 1312/Pdt.G/PA.Pbr

Melalui kuasa hukumnya, penggugat (istri) mendalilkan dalam salah satu positanya bahwa dirinya sering mengalami kekerasan seksual, yaitu dipaksa berhubungan suami istri, bahkan termasuk ketika dirinya dalam keadaan nifas. Dan ketika ia menolak, tergugat (suami) melontarkan kata-kata kasar semisal: “*dasar lonte kau, udah puas kau di luar, ya?*” dan sebagainya, dan terkadang perbuatan tersebut dilakukan dengan disertai kekerasan fisik.

Dalam positanya yang lain, Penggugat mengaku tidak ingin melaporkan perbuatan suaminya secara pidana karena tidak ingin ayah dari anak-anaknya itu masuk penjara.

Gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim



mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

- Putusan PA Bondowoso Nomor: 1674/Pdt.G/PA.Bdw

Dalam salah satu positanya, Penggugat (istri) mendalilkan bahwa dirinya dipaksa berhubungan seksual oleh suaminya pada malam pertama, padahal waktu itu dirinya sedang menstruasi, dan pada saat dirinya sudah bersih dan memberi tahu suaminya, tapi sang suami justru menolak berhubungan dan marah-marah. Hal ini kemudian menimbulkan pertengkaran dan mengakibatkan suami istri tersebut pisah rumah;

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa kehadiran tergugat (*verstek*).

- Putusan PA Bekasi Nomor: 2350/Pdt.G/2013/PA.Bks

Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa dirinya tidak sanggup melayani hasrat seksual suaminya (tergugat) yang dinilainya hiperseks (memiliki hasrat atau libido seksual yang tinggi), di mana ia harus melayani keinginan seksual sang suami sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari. Selain itu, ia juga dipaksa memanjangkan bulu ketiak dan suaminya suka menonton video porno.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek* (tanpa kehadiran tergugat), di mana gugatan cerai dikabulkan juga berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

- Putusan PA Medan Nomor: 1862/Pdt.G/PA.Mdn



Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa puncak pertengkaran penggugat terjadi pada tahun 2010 disebabkan karena suaminya (tergugat) memaksa penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, dan dirinya menolak karena ia tidak menyenangi perlakuan suaminya selama ini.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek* (tanpa kehadiran tergugat), di mana gugatan cerai dikabulkan juga berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Beberapa putusan di atas hanyalah sedikit di antara putusan Pengadilan Agama tentang perceraian dengan alasan terjadinya *marital rape* atau kekerasan seksual. Dalam putusan-putusan di atas, tampak bahwa *marital rape* tidak dijadikan sebagai klausul utama dalam pertimbangan, dan umumnya Majelis Hakim selalu mengarahkan pertimbangan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 atau Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.